

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)DALAM PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BANJAR

Atul Yogo Pratmo, Deli Anhar, Abdul Wahid
Ilmu Admnistasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 16120008
Ilmu Admnistrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 0010106201
Ilmu Admnistrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1115036001
Email : Ayppratmo@gmail.com

ABSTRAK

ATUL YOGO PRATMO, NPM. 1612000 "*Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banjar*" Bimbingan Bapak Deli Anhar, sebagai pembimbing utama dan Bapak Abdul Wahid, sebagai CO pembimbing.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar, untuk mengetahui apa saja hambatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar dan untuk mengetahui upaya apa saja untuk mengatasi hambatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada 6 orang yaitu :Kasi Kedaruratan, Anggota dan masyarakat. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar dilihat dari Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas sudah bisa dikatakan baik. Namun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki kedepannya seperti penambahan jumlah anggota, penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja agar lebih optimal.

Kata kunci : Kinerja, BPBD, Hutan dan Lahan

ABSTRACT

ATUL YOGO PRATMO, NPM. 1612000 "*Performance of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in the Implementation of Forest and Land Fire Management in Banjar District*" Guidance of Mr. Deli Anhar, as the main supervisor and Mr. Abdul Wahid, as CO supervisor.

The purpose of this study is to determine the Performance of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in the implementation of forest and land fire prevention in Banjar District, to find out what are the barriers to the Performance of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in the implementation of forest and land fire prevention in Banjar District and to find out any efforts to overcome obstacles in the Performance of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in the implementation of forest and land fire control in Banjar District.

The research method uses a qualitative approach with the type of descriptive qualitative research. Methods of data collection through observation, interviews and documentation to 6 people, namely: Emergency Section, Members and the community. The data obtained were then processed using qualitative descriptive analysis.

The conclusion of this study shows that the performance of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in the implementation of forest and land fire prevention in Banjar Regency viewed from Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability can be said to be good. But there are still things that need to be improved in the future such as increasing the number of members, adding facilities and infrastructure to support performance to be more optimal.

Keyword : Peformance, BPBD, Forest & Land

I. PENDAHULUAN

Negara kita Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki hutan yang sangat luas dimana luas hutan nomor sembilan terbesar di dunia dan Indonesia juga merupakan salah satu paru-paru dunia. Namun setiap tahunnya luas hutan Indonesia terus berkurang karena adanya bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia sejak tahun 1997 sampai saat ini hampir terjadi tiap tahunnya. Dan menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan citra satelit kebakaran hutan 2017 diduga telah membakar hutan dan lahan 124.983 hektar. Dan pada tahun 2018 menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karhutla juga terjadi dengan membakar hutan dan lahan seluas 194.757 hektar.

Kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak yang sangat buruk bagi manusia baik berupa kerugian kerusakan lingkungan, kerugian sosial, ekonomi dan kesehatan. Penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bisa terjadi secara alamiah seperti dipicu oleh petir, lelehan gunung api, dan sambaran petir. Dan penyebab kebakaran hutan dan lahan yang paling sering terjadi diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti eksploitasi sumber daya alam, membuka lahan baru untuk perkebunan dan membuang puntung rokok sembarangan. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan suatu bencana yang sangat serius karena membahayakan kehidupan terutama kesehatan masyarakat. Maka dari itu negara wajib melindungi warga negara dan warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara berdasarkan UUD 1945 pada alenia ke empat yang menyatakan "Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum". Dalam pernyataan ini bahwa ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dari bencana.

Sejalan dengan konstitusi yang telah disebutkan diatas maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yaitu, suatu lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. BNPB merupakan lembaga Negara non departemen setingkat menteri, sebagaimana diatur oleh Pasal 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dan untuk penyelenggaraan

penanggulangan bencana di daerah-daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kotamadya, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Banjar membentuk BPBD sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar. Tugas pokok BPBD Kabupaten Banjar yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana. Dan juga tugas BPBD Kabupaten Banjar menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat serta selalu siap jika ada bencana. Terlebih Kabupaten Banjar merupakan sebuah Kabupaten yang memiliki topografi yang sebagian besar wilayahnya pegunungan dan memiliki hutan yang luas. Dimana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kalseel tahun 2015 luas hutan lindung Kabupaten Banjar 29.719,93 hektar yang sangat rentan terbakar dimusim kemarau terlebih dengan adanya el nino.

Delapan tahun semenjak BPBD Kabupaten Banjar dibentuk sudah seringkali menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dilansir dari berbagai media pada tahun 2017 kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Banjar terbilang tinggi dengan luas 8.000 hektar. Dan pada tahun 2018 kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar paling luas di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 45,2 hektar. Dan sekarang pada saat ini di tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga terjadi di Kabupaten Banjar dan masih berlangsung hingga sekarang. Bahkan dampak dari kebakaran hutan dan lahan berupa asap sampai ke daerah Kota Banjarbaru yaitu Bandara Syamsudin Noor yang mengganggu aktivitas penerbangan dan sebagian besar wilayah Kabupaten Banjar di tutupi kabut asap yang parah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat terlihat peranan vital Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Banjar. Dengan berlangsungnya kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan, maka sanagat menarik untuk dibahas. Karena kabupaten

Banjar merupakan salah satu wilayah yang hampir setiap tahun menjadi langganan terjadinya Karhutla. Sehingga harus diakui dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar tidak serta merta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berjalan dengan semestinya, Karena penanggulangan Karhutla tampak semakin berat dan kompleks. Dan juga yang mungkin menjadi hambatan kinerja seperti kurangnya Produktivitas, Kualitas layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Tetapi bagaimanapun dalam menanggulangi Karhutla kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar jadi perhatian dan dituntut bekerja secara optimal.

II. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banjar ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banjar ?
3. Upaya apa saja untuk mengatasi hambatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banjar ?

III. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian hanya berkaitan dengan “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banjar” dengan menggunakan teori Dwiyanto dalam mengukur kinerja organisasi publik yaitu berdasarkan Produktivitas, Kualitas layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

IV. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banjar.

3. Untuk mengetahui upaya apa saja untuk mengatasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banjar.

V. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi peneliti, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan tentang Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar.
2. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi penyelenggara penanggulangan bencana di Kabupaten Banjar.
3. Bagi kegunaan praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penanggulangan bencana karhutla di Kabupaten Banjar.

VI. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kinerja

Menurut Tangkilisan (Tangkilisan and Hessel Nogi, 2005:178) Kinerja adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dapat diukur dari tingkat produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Sedangkan menurut (Anwar Prabu Mangkunegara, 2009:67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Bahwa kinerja (performance) merupakan hasil kerja (output) yang dicapai seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi dengan tugasnya masing-masing yang sudah ditentukan dan memiliki tanggung jawab serta kompetensi dalam menyelesaikan tugasnya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi, menurut (Robert L. Mathis and John H. Jackson, 2001:82) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu :

- a. Kemampuan mereka;
- b. Motivasi;
- c. Dukungan yang diterima;
- d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan;
- e. Hubungan mereka dalam organisasi.

Namun menurut (Gibson, 2008:123)ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu :

- a. Faktor individu : kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.
 - b. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja.
 - c. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (reward system).
3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja digunakan sebagai gambaran capaian suatu organisasi dan sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. menurut Dwiyanto (2006:50) dalam (Anwar Musyadad, 2015)mengukur kinerja birokrasi publik berdasarkan indikatornya antara lain :

- a. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayananan. Produktivitas umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.
- b. Kualitas Layanan
Banyak pandangan negatif mengenai organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima.
- c. Responsivitas
adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas
Konsep ini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi.
- e. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik

tunduk pada para pejabat politik yang dipilih rakyat. Hal ini lebih ditekankan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik konsisten pada aspirasi dan kehendak rakyat.

VII. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018:9)metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,digunakan untuk peneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai awalnya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tekni pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan ini digunakan karena dalam objek penelitian membutuhkan pengamatan yang mendalam berdasarkan teori dan fakta yang ada dilapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, sementara itu pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018:8) penelitian dengan analisis data deskriptif kualitatif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data lalu akan dikelompokkan dan disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan serta berhubungan dengan masalah yang dibahas sehingga untuk kemudian dapat diambil atau ditarik suatu kesimpulan, dan peneliti juga menggunakan penelitian pada kondisi objek yang alamiah.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banjar” ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut (Sugiyono, 2018:105) bila dilihat dari

segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara) kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Jadi dalam penelitian kali ini untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik, yaitu :

a. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan teknik penelitian dengan mengadakan penelitian langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data secara langsung dari responden yang dijadikan sampel penelitian. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan penulis adalah mengamati langsung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

b. Interview (wawancara)

Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2018:114) wawancara adalah pertemuan merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi diperoleh dari berdasarkan informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Analisis Data

Tahapan analisis data dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber-sumber lain terkumpul. Selain itu analisis data dapat dilakukan sebagai pengujian apakah hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Menurut (Sugiyono, 2018:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

a. Data collection (pengumpulan data)

b. Data reduction (reduksi data)

c. Conclusion drawing/verification

VIII. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Dalam Penelitian ini untuk mengetahui kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, kinerja diukur dengan indikator, yaitu : Produktivitas, Kualitas layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas.

a. Produktivitas

Produktivitas umumnya rasio antara input dan output, dimana dalam input tersebut ada jumlah sarana, jumlah pegawai, jumlah dana. Sedangkan output yaitu sesuatu yang dihasilkan. Dilihat dari hasil penelitian tentang produktivitas dimana dilihat dari segi sarana, jumlah pegawai dan dana bisa dikatakan bahwa indikator produktivitas belum terpenuhi. Dimana jumlah sarana dan jumlah pegawai masih belum terpenuhi bagaimana semestinya. Jumlah sarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar hanya mobil tangki pemadam 2 unit, mobil pick up 4 unit dan motor trail 5 unit. Sedangkan jumlah anggota dilapangan untuk memadamkan api yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar hanya 30 orang. Namun untuk jumlah dana bisa

dikatakan sudah memadai. Dari segi waktu tidak ada pastinya karena beberapa faktor seperti perbedaan jarak menuju titik api, perbedaan medan yang dilalui, hingga perbedaan luas lahan yang terbakar. Dan didukung pernyataan masyarakat Kabupaten Banjar maka dari itu kinerja anggota dilapangan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan cukup baik namun kurang maksimal karena masih kurang sarana dan anggota dilapangan.

b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan yaitu merupakan suatu indikator dalam mengukur kinerja organisasi pulik dimana dalam kualitas layanan tersebut ada bukti fisik berupa prasarana dan kehandalan. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian tentang kualitas layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dimana dilihat dari prasarana yang digunakan sudah memadai untuk menunjang kinerja seperti kantor, ruangan kerja, komputer dan radio. Dan untuk kehandalan anggota di lapangan sudah diadakan pelatihan-pelatihan kepada anggota-anggota dilapangan dan juga masyarakat. Karena jauh-jauh hari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar sudah siap dalam menanggulangi kebaran hutan dan lahan ini. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan. Maka untuk indikator kualitas layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar sudah terpenuhi.

c. Responsivitas

Responsivitas merupakan suatu indikator dalam organisasi untuk mengetahui daya tanggap organisasai dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut kita dapat melihat bahawa

responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar bisa dikatakan baik dan sudah memenuhi indikator responsivitas. Dan didukung oleh pernyataan dari mayrakat, dimana daya tanggap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bisa dikatakan sangat cepat merespon dan langsung terjun kelapangan jika ada laporan adanya titik api. Karena disetiap Kecamatan di Kabupaten Banjar ada operator yang terus memberikan informasi. Ketika adanya titik api lalu operator langsung melaporkan ke Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Banjar, maka setelah mendapatkan laporan tersebut anggota langgung menuju ke lokasi titik api.

d. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan suatu indikator dalam organisasi untuk mengetahui sejauh mana kerjasama yang dilakukan organisai tersebut dengan organisasi lainnya. Dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas dan didukung pernyataan masyarakat Kabupaten Banjar maka dapat mengambil kesimpulan bahwa indikator responsibilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah terpenuhi. Dalam pelaksanaan bencana kebakara hutan dan lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar melakukan kerjasama dengan TNI, POLRI, BASARNAS, BPK, Relawan, dan mayarakat. Karena dengan keterbatasan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar maka perlu adanya

kerjasama dengan instansi lain supaya kinerja dilapangan lebih optimal.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu salah satu indikator dalam organisasi untuk mengetahui kebijakan atau program dan manfaat yang dibuat oleh organisasi tersebut. Dari hasil penelitian tersebut dan juga pernyataan dari masyarakat dapat disimpulkan bahwa indikator akuntabilitas yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar sudah terpenuhi. Dimana dapat kita lihat dari adanya program yang berjalan dengan baik dan adanya bantuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat serta masyarakat merasakan manfaatnya. Dimana terdapatnya kegiatan-kegiatan atau program sudah terlaksana dengan baik serta mengajak masyarakat untuk bekerjasama. Kegiatan dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar seperti Gladi Lapangan, Desa Tangguh Bencana, Program IPABANA (Instalasi Pengolahan Air Bersih Bencana), Pembentukan PBBM (Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat), Simulasi Pencegahan Bencana, Apel Siaga Bencana, Pembentukan Posko Bencana, dan Sosialisasi PRB (Pengurangan Resiko Bencana).

2. Hambatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

a. Kurangnya jumlah anggota dilapangan

Jumlah anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar kurang, dimana BPBD Kabupaten Banjar hanya memiliki 30 anggota dilapangan yang terbagi menjadi lima regu. Jumlah

anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar sangat tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang dimiliki Kabupaten Banjar, dengan kurangnya jumlah anggota ini menjadi hambatan dan kinerja dilapangan kurang optimal.

b. Kurangnya jumlah sarana

Kurangnya sarana untuk menunjang kinerja anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dilapangan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dimana dengan luasnya wilayah Kabupaten Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar hanya memiliki 2 unit mobil tangki, 4 unit mobil pick up dan 5 unit motor trail. Dan kurangnya sarana ini menjadi hambatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

c. Sulitnya mendapatkan sumber air

Sulitnya mendapatkan sumber air karena bersamaan dengan musim kemarau. Sumber air merupakan suatu yang sangat diperlukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dilapangan karena pemadam api menggunakan air. Jika sulitnya mendapatkan air maka semakin sulit juga melakukan pemadaman api. Maka dari itu sulitnya mendapatkan sumber air menjadi hambatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dilapangan.

d. Sulitnya medan

Sulitnya medan yang dilalui anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, sehingga menyulitkan anggota di lapangan untuk mencapai titik api tersebut, seperti yang kita tahu Kabupaten Banjar banyak daerah pegunungan dan perbukitan. Sulitnya medan untuk menuju

titik api merupakan suatu hambatan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

- e. Kurangnya kesadaran
Kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang bahayanya membakar hutan dan lahan. kurangnya kesadaran masyarakat seperti membuang puntung rokok sembarangan. Puntung rokok bisa mengakibatkan kebakaran. Maka dari itu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi hambatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- f. Budaya masyarakat
Budaya masyarakat yang masih membuka ladang atau perkebunan dengan cara dibakar. Seperti yang kita ketahui Kabupaten Banjar adalah salah satu termasuk lumbung padi Kalimanta Selatan terutama daerah Kecamatan Gambut. Dan juga banak masyarakat Kabupaten Banjar berprofesi sebagai petani. Dan budaya mereka dalam membuka lahan atau ladang dengan cara dibakar karena murah, cepat dan menyuburkan tanah.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Banjar Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan Dan Lahan

Sehubungan dengan adanya hambatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan kurangnya jumlah anggotadilapangan dan sarana untuk menunjang kinerja yang dilapangan maka upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar yaitu dengan bekerjasama dengan beberapa instansi seperti TNI, POLRI, DAMKAR, BASAR-NAS, PMI, Relawan dan masyarakat. Karena dengan luasnya wilayah Kabupaten Banjar sedangkan jumlah anggota dan sarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar kurang memadai, maka dari itu sangat dibutuhkan kerjasama agar kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan ini lebih optimal.

Dengan sulitnya mendapatkan sumber air dan sulitnya medan yang dilalui maka upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar yaitu dengan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, dimana pemadaman dilakukan dengan menggunakan helikopter yaitu dengan cara water bombing.

Dan dengan kurangnya kesadaran masyarakat serta budaya masyarakat maka upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya membakar hutan dan lahan serta memberitahukan bahwa membakar hutan adalah sesuatu tindakan pidanayang melanggar hukum bisa di ancam kurungan penjara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

IX. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di ukur dari indikator Produktivitas, Kualitas layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas, sudah bisa dikatakan baik walaupun masih ada kekurangan dari segi indikator produktivitas seperti jumlah anggota dilapangan, sarana dan prasarana.
- b. Yang menjadi hambatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan seperti kurangnya jumlah anggota dilapangan, kurangnya jumlah sarana, sulitnya mendapatkan sumber air, sulitnya medan yang dilalui, kurangnya kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat yang membuka perkebunan atau ladang dengan cara dibakar.

- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya jumlah anggota dilapangan, kurangnya sarana dan prasarana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar melakukan kerjasama dengan beberapa instansi seperti TNI, POLRI, DAMKAR, BASAR-NAS, PMI, Relawan dan Masyarakat. Dengan sulitnya mendapatkan sumber air dan sulitnya medan maka dilakukan pemdaman melalui udara dengan helikopter dengan cara water boombing. Dan dengan kurangnya kesadaran masyarakat maka dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Saran

- a. Agar Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar lebih efektif dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan maka sebaiknya melakukan perekrutan penambahan anggota dilapangan, menambah sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan juga membagikan pamflet atau memasang spanduk tentang bahayanya membakar hutan dan lahan.
- c. Untuk mengatasi susah mendapatkan sumber air pada musim kemarau dan lokasi yang susah dijangkau sebaiknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar membuat penampungan air hujan atau kanal-kanal jauh-jauh hari sebelum musim kemarau tiba.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Musyadad. (2015). *Kinerja badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) dalam penanggulangan bencana banjir di kabupaten lebak*.
- Anwar Prabu Mangkunegara. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gibson, M. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cetakan ke dua, ed.). Jakarta: Erlangga.
- Robert L. Mathis, & John H. Jackson. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta, CV.
- Tangkilisan, & Hessel Nogi. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Media.
- Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke IV
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan STOK BPBD Kabupaten Banjar dengan Tipe B